

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukuman bagi kejahatan pemalsuan surat kelahiran dilihat dari contoh kasus berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijatuhi hukuman dibawah 1 (satu) tahun. Selain KUHP yang mengaturnya terdapat juga aturan khusus mengenai administrasi kependudukan yaitu Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada mengatur mengenai tindak pemalsuan akta kelahiran. Dilihat dari isi pasal mengenai tindak pemalsuan akta kelahiran pada Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan selain hukuman pidana terdapat juga hukuman denda sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pelakunya hanya dikenakan pidana saja.
2. Upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan akta kelahiran yaitu dengan :
 - a. Tindakan Preventif dengan cara Pengaman pada kertas akta kelahiran agar sulit untuk dipalsukan sesuai dengan Putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil, sosialisasi pada masyarakat

mengenai proses pembuatan akta kelahiran dan perbaikan sistem administrasi dan pengawasan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- b. Tindakan represif dengan cara upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan pemalsuan akta kelahiran yang dilakukan. Serta Hakim wajib memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta kelahiran sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

B. Saran

1. Dalam tindak kejahatan pemalsuan akta kelahiran peraturan yang lebih khusus tidak digunakan dalam menghukum tindak kejahatan. Tindak kejahatan pemalsuan akta kelahiran dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan selain hukuman pidana terdapat juga hukuman denda yang diharapkan dapat membuat efek jera para pelaku kejahatan tersebut.
2. Sosialisasi mengenai akta kelahiran dan memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih perlu ditingkatkan dan terus menerus dilakukan sehingga diharapkan peluang untuk tindak kejahatan pemalsuan akta kelahiran dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar.
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cet I, Jakarta.
- Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch.Anwar.S.H, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, POLITEIA, Bogor, 1995
- Salam Ibnu Syamsi, “*Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan*” (Makalah-STAI Hasan Jufri, Bawean, 2012)
- Satochid Kartanegara (ii), *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, tanpa tahun dan penerbit.

Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, 2003, *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang IdentitasCet 2*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981)

Sudikno Metokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Suharjono, "Varia Peradilan Tahun 2014 Nomor 123", *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*,

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.49

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Keputusan Putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil

Peraturan Walikota Bandung Nomor : 001 Tahun 2010 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

C. Sumber Lain

Blogger, Pengertian Definisi Akta,
<http://definisiarti.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-definisi-akta.html>,
23 September 2016, 12.30 WIB.